



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR 2021 -2026



Jl. Cokroaminoto No. 22 Blitar

Email : disnakkan@blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan perikanan mendapatkan berbagai masalah dan tantangan. Dalam menyikapi keadaan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang secara sistematis dan akuntabel agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dimaksud tertuang dalam Rencana Strategis yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kami yakin dengan tersusunnya Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Blitar, Desember 2022

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR**



TOHA MASHURI S.Sos MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700219 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB. II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	5
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
2.2. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI.....	8
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
2.2.2 SUMBER DAYA PENDUKUNG/SARANA DAN PRASARANA.....	11
2.3 KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	17
2.3.1 KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3.2 KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA	26
2.4.1 TANTANGAN.....	26
2.4.2 PELUANG	27
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.....	30
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	34
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI.....	38
3.3.1 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	38
3.3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN PERTANIAN	41

3.3.3 TELAAH RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR44

3.3.4 TELAAH RENSTRA DINAS PETERNAKAN PROVINSI
JAWA TIMUR.....45

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS46

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH46

3.3.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PADA RPJMD.....53

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS54

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.....55

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....58

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN.....70

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....78

BAB. VIII PENUTUP88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra – OPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunannya, Renstra OPD merupakan refleksi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar.

Disamping itu pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berangkat dari ketentuan diatas, dimana Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu institusi Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintah maka sudah menjadi kewajiban melekat untuk mempunyai Rencana Strategis. Dengan demikian Rencana Strategis Peternakan dan Perikanan dibuat, hal ini merupakan salah satu kesadaran untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dimana dengan dirumuskannya secara strategis, maka Dinas Peternakan dan Perikanan telah menentukan arah perkembangan Organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dan dengan penentuan visi, misi serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi tanggapan Organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang selalu berubah secara dinamis, Dinas Peternakan dan Perikanan telah menetapkan formulasi arah yang akan dituju termasuk bagaimana cara mencapainya.

Perubahan Renstra OPD Tahun 2021 -2026 memuat tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai pedoman perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja

tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2021-2026 telah melalui berbagai tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir
- f. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 259 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah penyesuaian sasaran strategis maupun target capaian yang tertuang dalam dokumen resmi OPD sebagai pedoman melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 memberikan pedoman arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”, dengan tujuan :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.
5. Menelaah konsistensi dan relevansi dokumen RENSTRA terhadap perubahan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang peternakan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan rencana dan program kerja Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan perencanaan dinas serta rumah tangga Dinas;
- c. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan *sustainable development goals* hewan dalam Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- g. pelaksanaan koordinasi pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penetapan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Provinsi Jawa Timur;
- i. pelaksanaan koordinasi pengembangan prasarana peternakan, lahan penggembalaan umum;
- j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dan penetapan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (*zoonosis*) dalam Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi pengawasan pemasukan hewan dan produk asal hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk asal

hewan dari Daerah;

- m. pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium bidang peternakan dan perikanan serta jasa medik veteriner dalam Daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan persyaratan dan pembinaan persyaratan teknis *hygiene* sanitasi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit hewan dan bencana alam yang berakibat pada hewan;
- p. penerbitan izin usaha peternakan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan serta izin usaha pengecer obat hewan, surat keterangan kesehatan hewan dan produk asal hewan;
- q. pelaksanaan validasi bahan dan menetapkan kebijakan kenelayanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- r. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan kenelayanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- s. penetapan kebijakan fasilitasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- t. pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Dinas; dan
- u. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang terkait bidang peternakan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

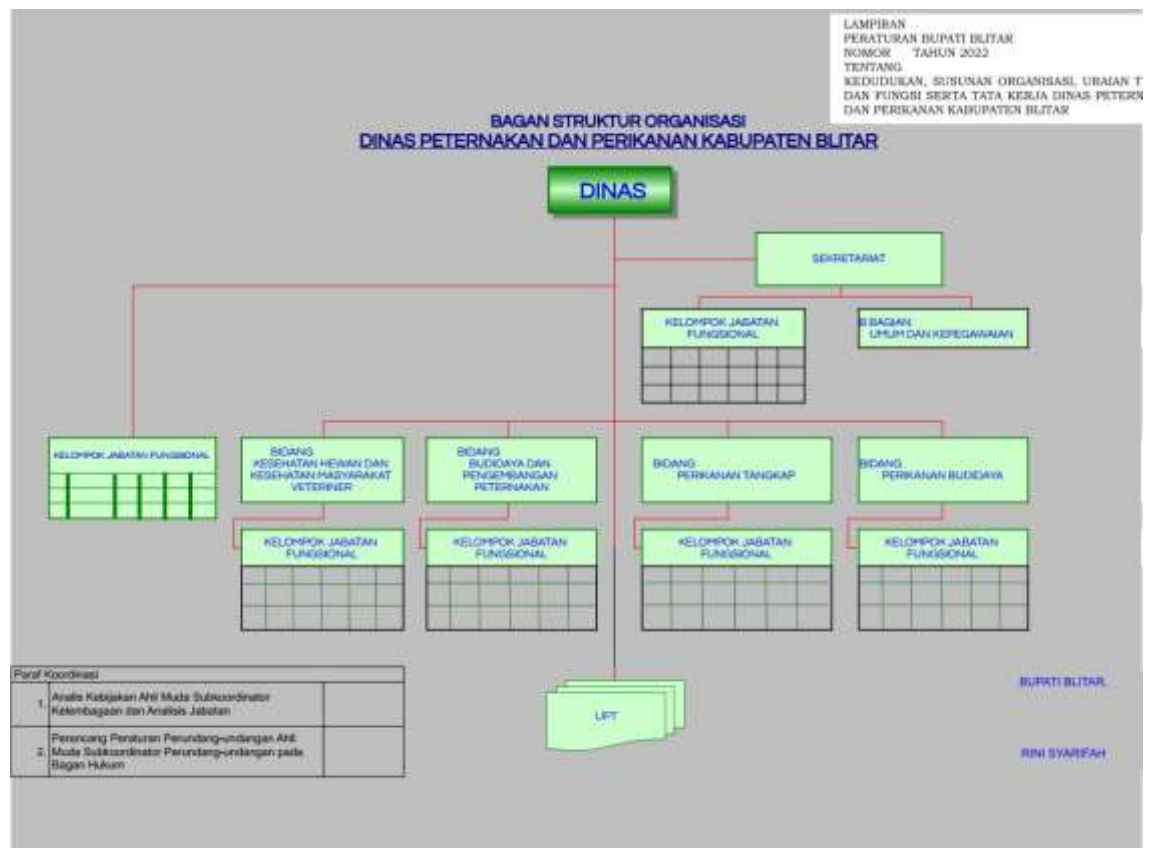
Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dijelaskan Struktur Organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub. Koordinator Penyusunan Program;
3. Sub Koordinasi Keuangan;
- b. Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan, membawahi:
 1. Sub. Koordinator Perbibitan dan Sumberdaya Genetik;
 2. Sub. Koordinator Bina Usaha Peternakan;
 3. Sub. Koordinator Pakan Ternak.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Sub. Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 2. Sub. Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 3. Sub. Koordinator Kesehatan dan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Sub. Koordinator Produksi dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Sub. Koordinator Nelayan;
 3. Sub. Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Sub. Koordinator Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;
 2. Sub. Koordinator Budidaya Ikan;
 3. Sub. Koordinator Kesehatan Ikan dan Pengendalian Mutu.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melihat dan mengetahui susunan organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Susunan Organisasi
Dinas Peternakan dan Perikanan



2.2. Sumber Daya Yang Dimiliki

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan salah satu OPD yang mempunyai peran dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Dalam menunjang sub sektor peternakan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut.

Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9	11.1
4	Diploma III	7	8.6
5	Sarjana (S1)	37	45.6
6	Pasca Sarjana (S2)	28	34.7
7	Doctor (S3)	-	-
Total		81	100

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh 81 orang sumber daya manusia atau lebih dari separoh mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 37 orang (45.6 %), sehingga mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik.

Tabel 2
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	14	17.5
3	Golongan III	55	67.5
4	Golongan IV	12	15
Total		81	100

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh 81 orang ASN atau lebih dari separoh mempunyai golongan III dengan jumlah 55 orang

(67.5%), sehingga mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik karena telah memiliki pengalaman kerja yang cukup dan cakap.

Tabel 3
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Jabatan / Eselon
Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Eselon I	-	-
2	Eselon II	1	1,2
3	Eselon III	5	6,1
4	Eselon IV	17	21
5	Fungsional Tertentu (JFT)*	27	33,4
6	Fungsional Umum (Staf)	31	38,3
Total		81	100

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga didukung oleh P3K sebanyak 3 orang, tenaga harian lepas (THL) Kementerian Pertanian sebanyak 5 orang, THL Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 2 orang, Penyuluh Perikanan 3 orang Petugas Inseminasi Buatan sebanyak 57 orang serta THL daerah sebanyak 45 orang.

Tabel 4
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pria	43	53
2	Wanita	38	47
Total		81	100

2.2.2. Sumber Daya Pendukung/ Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diperlukan sarana dan prasarana penunjang OPD yang memadai, hingga saat ini sarana dan prasarana yang tersedia pada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Penunjang OPD
Tahun 2021

No	NAMA	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3		
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	1		
3	Tanah Peternakan Lainnya	2	2		
4	Portable Generating Set	3	3		
5	Transportable Water Pomp	5	5		
6	Portable Water Pump	14	14		
7	Pompa Lain-lain	22	22		
8	Station Wagon	7	7		
9	Sepeda Motor	25	25		1
10	Global Positioning System	3	3		
11	ALat Ukur Universal Lain-lain	3	3		
12	Timbangan	17	17		
13	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	39	39		
14	Tang Pemasang/Kar	1	1		

	Tang				
15	Alat-alat Peternakan Lain-lain	77	77		
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1		
17	Lemari Besi	23	23		
18	Rak Besi/Metal	3	3		
19	Rak Kayu	4	4		
20	Filling Besi/Metal	20	20		
21	Brankas	2	2		
22	Lemari Kaca	3	3		1
23	Lemari kayu	16	16		5
24	Kursi Besi/Metal	5	5		3
25	Meja Rapat	8	8		1
26	Meja Reseption	1	1		
27	Kursi Tamu	7	7		
28	Kursi Putar	4	4		
29	Kursi Lipat	126	126		3
30	Meja Komputer	9	9		
31	Tenda	1	1		
32	Sofa	1	1		
33	Alat Pembersih Lain- lain	72	72		
34	Lemari Es	4	4		
35	AC Unit	10	10		
36	Kipas Angin	2	2		
37	Kompor Gas	4	4		
38	Tabung Gas	1	1		
39	Televisi	15	15		
40	Handy Cam	1	1		
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20	20		
42	P.C Unit	17	17		
43	Lap Top	40	40		1
44	Floopy Disk Unit	1	1		
45	CPU	2	2		

46	Hard Disk	3	3		
47	Keyboard	1	1		
48	Printer	52	52		2
49	External	1	1		
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	22	22		10
51	Modem	6	6		
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18	18		
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	23		13
56	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	2		
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	0		
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	18		
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	9		7
61	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	2		
62	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	1	1		
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	5		
64	Camera + Attachment	3	3		
65	Proyektor + Attachment	1	1		
66	Microphone/Wireless	1	1		

	Mic				
67	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	4		
68	Camera Film	2	2		
69	Timbangan Hewan	4	4		
70	Pesawat Telephone	2	2		
71	Telephone Mobile	1	1		
72	Facsimile	3	3		
73	Alat Komunikasi Lain-lain	1	1		
74	Stetoscope	8	8		1
75	ALat Kedokteran Umum Lain Lain	23	23		76
76	USG	3	3		
77	Colony Counter	1	1		
78	Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain	6	6		
79	Sput 2 cc, 5cc, 10cc	25	25		
80	Beaker Glass	8	8		
81	Incubator	1	1		
82	Pocket Stereoscope	1	1		
83	Camera Photo Micrograph	1	1		
84	Labu Takar	12	12		
85	Furnace	1	1		
86	Alat Kedokteran Umum Lain-Lain	54	54		1
87	Pipette Filter	1	1		
88	Tube for Centrifuge	10	10		
89	Petri Dish	5	5		
90	Destilator	1	1		
91	Lacto Meter	1	1		
92	Staining Jars	2	2		
93	Pipet	104	104		1
94	Sentrifush Electric	1	1		
95	Lemari Asam	1	1		

96	Al Apparatus	18	18		
97	Container N2 Cair	24	24		
98	Fibertec System	1	1		
99	Alat Lab. Pertanian Lain-Lain	34	34		
100	Hot Plate Stirer	1	1		
101	Pipet Ukur	6	6		
102	Colony Counter & Automatic Taly	1	1		
103	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	334	334		39
104	Gelas Ukur	6	6		
105	Mikroskop	4	4		
106	Laboratory/Service Wagon/Cart	8	8		
107	Stetoscope	5	5		1
108	Lampu UV	13	13		
109	PH Meter	4	4		
110	Timbangan	2	2		
111	Barang Koleksi Rumah Tangga	1	1		1
112	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	10		
113	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	5		
114	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	1		
115	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	3	3		
117	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2	2		
118	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	5	5		
119	Bangunan Gedung	7	7		

	Pemotongan Hewan Lain-lain				
120	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	4	4		
121	Rambu Jalan	1	1		

Kendaraan dinas operasional yang antara lain yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang dapat menunjang tugas dan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Mobil Toyota Inova sebanyak 2 unit;
2. Isuzu Panther sebanyak 3 unit;
3. Avanza sebanyak 1 unit;
4. Pick Up sebanyak 3 Unit;
5. Truck Box Dyna (Truk Roda 6 Berpendingin) Tahun 2009 sebanyak 1 Unit;
6. Bus sebanyak 1 unit;
7. Sepeda motor sebanyak 45 unit yang terinci dalam merek dan tahun serta kondisi kendaraan yang berbeda.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisinya maka secara umum dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu dapat membrikan dukungan didalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, namun untuk kedepan diperlukan pengadaan atau perbaikan sarana prasarana sebagai upaya meningkatkan kinerja.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah khususnya pada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat dari perkembangan populasi ternak dan produksi perikanan yang terdapat diwilayah kerja, adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Kinerja Pelayanan Bidang Peternakan Kabupaten Blitar

No	URAIAN	Sat	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	Ekor	148,394	156,383	151,164	151,720
2	Sapi Perah	Ekor	15,280	15,780	16,973	19,240
3	Kerbau	Ekor	1,863	1,843	1,620	1,510
4	Babi	Ekor	8,052	10,020	9,386	9,620
5	Kambing	Ekor	153,341	154,100	154,130	153,800
6	Domba	Ekor	7,916	7,314	7,264	8,610
7	Ayam Ras Petelur	Ekor	15,365,100	16,800,100	17,077,100	19,060,000
8	Ayam Bukan Ras	Ekor	2,615,700	2,620,200	2,675,400	2,925,300
9	Ayam Ras Pedaging	Ekor	4,016,800	4,030,800	4,072,800	3,353,200
10	Itik	Ekor	1,010,800	1,180,100	1,476,000	1,560,000
11	Entok	Ekor	80,823	76,800	76,600	73,200
12	Kelinci	Ekor	16,154	15,742	15,512	14,487
13	Puyuh	Ekor	444,300	470,100	479,000	512,000

Tabel 7
Data Produksi Peternakan Kabupaten Blitar

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas <i>Products and Kinds Of Livestock/ Poultry</i>		2018	2019	2020
I.	Daging - Sapi/ Cow - Kerbau/ <i>Buffalo</i> - Kuda/ <i>Horse</i> - Babi/ <i>Pigs</i> - Kambing/ <i>Goat</i> - Domba/ <i>Sheep</i> - Ayam Buras/ <i>Domestic Hen</i> - Ayam Petelor/ <i>Layer Hen</i> - Itik/ <i>Duck</i>	18,776.470 - - - 2,103.143 137.817 1,326.907 13,076.869 607.790	18,870.352 2,103.353 137.845 1,326.920 13,078.177 608.398	16,039.799 1,703.716 110.276 862 9,154.724 365.039
	- Ayam Pedaging/ <i>Broiler</i> Total	25,092.147 61,121.143	25,092.398 61,217.443	15,055.439 43,291.491
II.	Susu/ Milk (Ton) - Sapi/ <i>Dairy Cow</i> - Kambing Perah/ <i>Dairy Goats</i> Total	34,787.925 140.895 34,928.820	35,488.178 141.985 35,630.163	40,251.257 140.985 40,392.242
III.	Telur/ Eggs (Ton)			
	- Ayam Buras/ <i>Domestic Hen</i> - Ayam Ras/ <i>Pedigree Hen</i> - Itik/ <i>Duck</i>	1,503.909 155,917.896 6,799.644	1,468,120 163,395,250 8,881,405	1,464,332 166,991,702 10,824,242
	- Entok/ <i>Manila Duck</i>	148.475	101,126	98,208
	- Puyuh	557.875		583,920

			543,285	
	Total	164,927.799	174,389,186.188	179,962,404

Produksi Perikanan berasal dari perikanan tangkap yang bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum daratan (PUD) serta perikanan budidaya yang keduanya memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel perbandingan produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Blitar dari tahun 2017 hingga tahun 2020

Tabel 8
Kinerja Pelayanan Bidang Perikanan Kabupaten Blitar

No	Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020
		Produksi	Produksi	Produksi	Produksi	Produksi
	Tangkap (ton)	888.20	2,034.70	3,676.90	6,394.50	2,283.7
1	Laut	620.70	1,735.30	3,382.00	5,981.00	2,054.7
2	PUD	267.50	299.40	294.90	413.50	229.0
	Budidaya (ton)	16,304.61	17,361.05	17,978.93	18,697.04	17,762.09
1	Kolam	15,772.31	16,838.55	17,444.05	18,137.25	17,290.1
2	Mina Padi	5.50	5.50	7.53	8.92	5.3
3	Karamba	-	-	-	-	-
4	Jaring Apung	66.80	57.00	67.35	70.77	47.2
5	Tambak	460.00	460.00	460.00	480.10	419.5
6	Ikan Hias (ekor)	277,857,000	277,901,000	232,863,000	221,247,130	224,127,450.0

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan produksi perikanan	NA	8	5.7	0.1	0.2	NA	8.75	4.55	(- 34.5)	0.2	NA	153.51	79.82	NA	100.00
2	Total produksi perikanan	20,013.63	19,486.50	20,596.30	23,681.32	20,600.00	19,395.75	21,655.83	25,091.54	20,045.79	20,600.00	96.91	105.14	121.83	84.65	100.00
3	Perikanan tangkap	2,034.70	1,510.00	2,620.00	3,863.02	2,800.00	2,034.70	3,676.90	6,394.50	2,283.70	2,800.00	100.00	140.34	244.06	59.12	100.00
4	Perikanan budidaya	17,978.93	17,976.50	17,976.30	19,818.30	17,800.00	17,361.05	17,978.93	18,697.04	17,762.09	17,800.00	96.56	100.01	104.01	89.62	100.00
5	Jumlah TPI yang beroperasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
9	Kenaikan	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	100.0

	kelahiran bibit ternak															0
10	Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (%)	1	1	1	0.4	0,2	1.03	1	1.08	0.42	0,2	103	100.00	108.00	105.00	100.00
11	Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar (%)	NA	95	96	90	98	NA	99.28	98.7	97.2	98	NA	103.42	102.8125	108	100
12	Bencana akibat penyakit hewan	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	100.00

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disampaikan kinerja keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dari Tahun 2017 – 2021. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain;

1. Perencanaan yang belum optimal, masih adanya belanja modal yang tidak masuk pada RKBMD maupun SHB sehingga hal ini perlu diperbaiki.
2. Efisiensi yang telah dilaksanakan secara efektif sehingga muncul sisa penyerapan anggaran/ SILPA.

Tabel 10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran **)					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	510,676,400	439,296,400	466,202,000	388,902,000	472,812,000	435,413,400	423,932,000	503,979,000	462,380,500	472,812,000	85.26	96.50	108.10	118.89	100
2	Belanja	13,633,280,968	12,672,960,373	15,283,295,100	13,421,302,634	23,938,633,670	10,275,909,196	11,419,153,672	14,702,352,484	12,870,597,702	23,938,633,670	75.37	90.11	96.20	95.90	100
	- Belanja Operasi	9,852,275,676	8,820,716,820	12,405,999,917	11,307,653,874	5,214,068,505	8,274,839,196	8,134,304,692	11,860,896,809	10,847,716,744	5,214,068,505	83.99	92.22	95.61	95.93	100
	- Belanja Modal	3,781,005,292	3,852,243,553	2,877,295,183	2,113,648,760	5,214,068,505	2,001,070,000	3,284,848,980	2841455675	2022880958	5,214,068,505	52.92	85.27	98.75	95.71	100
	- Belanja Pegawai					13,510,496,660					13,510,496,660					100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor perikanan baik ditinjau dari institusi perikanan, masyarakat perikanan (pembudidaya/ nelayan) dapat diindikasikan tantangan sebagai berikut:

Tantangan eksternal:

1. Produksi perikanan tangkap masih tergantung pada faktor cuaca (gelombang tinggi dan angin barat daya) dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan migrasi ikan di Samudra Hindia (***ketergantuan pada faktor cuaca masih mendominasi***).
2. Regulasi penyaluran bantuan/ hibah yang perlu diperjelas mengingat nelayan banyak yang belum memenuhi persyaratan ditandai dengan rendahnya cakupan bina nelayan di Kabupaten Blitar.
3. Mayoritas nelayan menyerahkan hasil tangkapan ke pelabuhan pendaratan ikan di Malang (PPI Sendang Biru) dan Trenggalek (PPI Prigi).
4. Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi sehingga menaikkan biaya produksi ikan budidaya.
5. Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Blitar masih rendah.
6. Mayoritas Usaha budidaya ikan merupakan usaha sambilan (Luas kolam yang dimiliki sebagian besar antara 0,11- 0,3 Ha)
7. Minimnya sarana dan prasarana pendukung industrialisasi usaha kelautan dan perikanan, baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasarannya.
8. Aspek politis berupa otonomi daerah dapat memperumit perbatasan wilayah laut antar daerah/kabupaten.
9. Semakin ketatnya persyaratan ekspor hasil perikanan terkait mutu dan keamanan pangan.
10. Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi.
11. Belum tertatanya sistem mata rantai niaga ikan terutama SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional).
12. Masih banyak pembudidaya ikan yang belum bisa menjangkau/ mengakses perbankan (belum *bankable*).
13. Rendahnya ketrampilan nelayan dalam memanfaatkan teknologi.

14. Rendahnya kapasitas PPI Tambakrejo dan beberapa tempat pendaratan ikan lainnya sebagai tempat berlabuh bagi kapal nelayan.
15. Lemahnya keamanan wilayah pesisir dan laut.
16. Sebagian besar nelayan masih tergolong miskin (nelayan tradisional).

Selain pada sektor perikanan, tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi pada sub sektor peternakan antara lain:

1. Kekurangan stok bahan pakan ternak terutama jagung yang murah dan berkualitas.
2. Fasilitas pengembangan seperti pengadaan bibit dan inseminasi buatan masih kurang maksimal.
3. Keterbatasan dana pengembangan yang berimbas pada kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja SKPD Peternakan.
4. Bahan pakan dan obat ternak mayoritas impor, serta kelangkaan hijauan pakan ternak pada musim kemarau.
5. Sulitnya pengadaan bibit ternak unggul.
6. Rendahnya investasi di bidang pengolahan komoditas hasil ternak.
7. Nilai tawar peternak terhadap harga jual produk masih rendah..
8. Standarisasi global yang cukup sulit untuk dipenuhi produk peternakan rakyat sebagai pelaku mayoritas usaha peternakan;
9. Rentannya harga produk terhadap faktor produksi dan kondisi sosial.
10. Persaingan dengan daerah luar yang memiliki kesamaan sumberdaya dan sosiokultural masyarakat menimbulkan terjadinya perebutan pasar.
11. Kebijakan pemerintah pusat yang menganggap usaha peternakan ayam ras adalah usaha peternakan komersial, padahal di Kab. Blitar usaha peternakan ayam ras peternakan 80% adalah peternakan rakyat.

2.4.2 Peluang

Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan baik ditinjau dari institusi peternakan, masyarakat peternak, dan hewan ternak dapat diidentifikasi adanya peluang sebagai berikut:

Peluang internal

1. Keunggulan sebagai penghasil komoditas telur dengan produksi $\pm$ 480 ton perhari dan susu 125 ton perhari.

2. Terdapatnya kawasan yang mempunyai keunggulan komparatif penghasil ternak unggas, ternak besar maupun kecil yang diusahakan oleh peternakan rakyat.
3. Meratanya produktivitas komoditas ternak khususnya unggas, sapi potong dan ternak non unggulan (seperti pada data produksi ternak).
4. Budaya masyarakat (sosiokultural) yang menjadikan peternakan sebagai tradisi mata pencaharian karena telah diwariskan secara turun menurun.
5. Kondisi geografis dan topografis yang mendukung usaha peternakan, khususnya kecukupan pakan hijauan ternak dan iklim untuk sapi perah. Penyerapan tenaga kerja sektor peternakan yang selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Peluang eksternal:

1. Jaringan pemasaran yang telah terbentuk begitu kuat (khususnya *interlinkage* seperti kemitraan dan rekanan bisnis).
2. Sudah terbentuknya *interlinkage* permodalan antara perbankan dan peternak yang dimediasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.
3. Peran asosiasi pengusaha ternak dalam menularkan informasi *input*, *output* dan pasar.
4. Laju konsumsi protein hewani yang terus melonjak di pasar dunia, nasional maupun regional.
5. Banyaknya permintaan produk hasil ternak, khususnya industri pengolahan pangan maupun non pangan hasil ternak.
6. Kebijakan terhadap pengembangan peternakan nasional, khususnya regulasi yang mendukung pengembangan komoditas ternak unggulan.
7. Rangsangan terhadap minat investasi yang semakin besar, khususnya produk makanan berbahan produk ternak.
8. Semakin sadarnya masyarakat dan pengusaha ternak akan usaha ternak yang ramah lingkungan, sehingga dapat menurunkan resiko hambatan eksternal usaha bidang peternakan.

Sedangkan peluang pada sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Tingginya permintaan masyarakat akan hasil ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.
2. Dicanangkannya industrialisasi pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan berbasis masyarakat oleh Pemerintah Pusat.
3. Akses pasar yang sangat luas dari sektor perikanan.

4. Penggalakan industri berbasis sumberdaya alam, khususnya industri berbasis perikanan (*fisheries based industries*) oleh Pemerintah.
5. Semakin gencarnya dunia perbankan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan khususnya program kredit.
6. Potensi lestari sumberdaya ikan yang begitu besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Banyaknya industri subsektoral yang dapat dibangun/dikembangkan melalui sektor perikanan dan kelautan (seperti pengalengan, galangan, kapal, pengolahan perkomoditi dan lain-lain).
8. Adanya lokasi PPI Tambakrejo dan beberapa tempat pendaratan ikan lainnya.
9. Adanya Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu).
10. Ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan cuaca ekstrim.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranngkat Daerah

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 3 dan Misi 4 Kabupaten Blitar. Berdasarkan evaluasi atas kinerja Peternakan Kabupaten Blitar dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 11

PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya produksi perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap belum optimal.	Belum optimalnya pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD).
			Pemberdayaan nelayan kecil yang masih rendah.
			Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal.
			Pemberdayaan kapal nelayan berukuran sampai dengan 10 GT belum optimal.
		Pengelolaan perikanan budidaya belum optimal.	Belum optimalnya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.
			Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil masih belum optimal.
			Belum intensifnya pengelolaan pembudidayaan ikan.
		Pengawasan sumber daya kelautan dan	Belum adanya pengawasan sumber daya perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perikanan belum optimal.	budidaya.
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum optimal.	Pendampingan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil belum terkelola dengan baik. Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan belum optimal.
2	Masih rendah produktifitas dan kualitas produk peternakan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian masih minim.	Penyediaan dan Pengawasan penggunaan sarana pertanian kurang optimal. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, yang belum optimal. Belum optimalnya peningkatan mutu dan kualitas bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak yang kontinyu dengan harga yang relative stabil. Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer sehingga aman dan layak dipergunakan. Kurangnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak. serta pakan ternak yang ramah lingkungan dan bebas bahan baku local

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum optimal	Pembangunan/penyediaan serta pemeliharaan Prasarana Sub Sektor Peternakan (Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan) belum optimal
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak yang belum terkelola
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum optimal	Tingginya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan beserta produk-produknya belum optimal
			Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam rangka pengobatan penyakit hewan menular strategis belum optimal
			Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner dalam rangka menjamin ketersediaan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) belum optimal
			Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan belum optimal
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian belum optimal.	Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan belum optimal.
		Pengelolaan perizinan usaha pertanian belum	Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		optimal.	daerah kabupaten/kota.
			Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
			Belum optimalnya pelayanan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
		Penyuluhan/ pembinaan sub sektor peternakan belum optimal.	Pelaksanaan penyuluhan/ pembinaan sub sektor peternakan belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldataun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*)”**.

a. Misi

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2021-2026, diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

- Misi I : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dengan Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak, perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Misi II : Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi** , dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar melalui Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan non formal dan Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi Percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
- Misi III : Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas** melalui tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi dan Tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah

berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Misi IV : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui Pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD, Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah, Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar, Penyediaan sarana dan prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan, Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih, Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri dan berkelanjutan.	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel. 12

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan Bernafaskan Semangat Baldatun, Thoyyibatun Wa Robbun Ghofuur			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Tergantungnya harga dan ketersediaan sarana peternakan dengan pihak asing (mayoritas barang import).	Pendampingan uji coba bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan harga terjangkau.
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Cakupan wilayah yang luas 22 kec/ 248 desa menuntut ketersediaan prasarana peternakan.	Kerjasama dengan pihak swasta/ CSR.
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.	Ancaman penyakit menular strategis yang terus berkembang sehingga dibutuhkan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan efisiensi	SDM yang cukup memadai ditambah keberadaan tenaga Medik dan Paramedik Veteriner Mandiri di Kabupaten Blitar.
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.	Kondisi cuaca yang ekstrim dan ancaman penyakit strategis yang banyak membuat rawan	Kesadaran masyarakat peternakan tentang tindakan pencegahan

		bencana	penyakit yang tinggi.
	Program penyuluh pertanian	Diperlukan adanya inovasi dan implementasi ilmu pengetahuan terkini dalam budidaya dan pengembangan peternakan yang modern.	Kesadaran masyarakat peternakan tentang teknologi peternakan yang tinggi.
	Program perizinan pertanian.	Kondisi usaha peternakan yang fluktuatif ditambah dampak pandemik global menurunkan minat peternak dalam rangka pengurusan izin usaha peternakan.	Kerjasama dengan <i>stackholder</i> dalam rangka meningkatkan kesadaran dan minat perizinan usaha peternakan.
	Program pengelolaan perikanan tangkap.	Faktor cuaca dan keterbatasan sarana prasarana serta cakupan bina nelayan yang masih rendah.	Peningkatan cakupan bina nelayan yang terus ditingkatkan.
	Program pengelolaan perikanan budidaya.	Tingginya harga sarana (pakan) yang tidak diimbangi dengan harga produksi perikanan konsumsi.	Kesadaran pembudidaya dalam penerapan teknologi dalam rangka budidaya ikan yang efektif dan efisien, peningkatan permintaan ikan hias yang cukup signifikan.
	Program	Minimnya	Efek cuaca

	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	ekstrim membutuhkan adanya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Minimnya pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.	Efek pandemi mengakibatkan perubahan pola pikir pelaku usaha untuk meningkatkan nilai jual produk perikanan melalui pengolahan.

3.3 Telaahan Renstra KL dan Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka melaksanakan visi tersebut diatas Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
 2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
 3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
- dan

4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:

1. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
5. Optimalnya pengelolaan ruang laut.

Tabel. 13

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP).	Belum terkelolanya sektor hilir (pemasaraan) sebagai alternatif disaat permintaan melemah.	Adanya sistem Kerjasama CSR dengan pihak swasta.
Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat. -	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan.	Rendahnya pembinaan baik pada pembudidaya dan nelayan.	Tingginya permintaan ikan hias. Produksi Ikan Koi Kabupaten Blitar menduduki peringkat pertama

			nasional.
Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.	Peningkayan nilai ekspor hasil perikanan.	Faktor cuaca/ alam yang masih mendominasi terutama pada perikanan tangkap.	Ikan koi yang merupakan kluster unggulan Kabupaten Blitar.
Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat.	Kenaikan konsumsi ikan.	Daya beli masyarakat yang masih rendah.	Produksi ikan gurami Kabupaten Blitar menduduki peringkat II di Jawa Timur.
Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan.	proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman meningkat.		
Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab.	Peningkatan luas kawasan konservasi perairan.		
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	Peningkatan produksi perikanan.		
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi garam.		

integrative.			
	Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan meningkat.		

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024 adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan.
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian.

Tabel. 14

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan
Kab. Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pertanian

Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja.	Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.	Belum terjaminnya ketersediaan bahan pakan dan bibit ternak yang berkualitas.	Adanya sistem kerjasama CSR dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan bahan pakan ternak yang berkualitas.
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional.	Rendahnya pembinaan baik pada peternak.	Cuaca dan topografi lingkungan yang mendukung.
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.	Tingginya kasus Penyakit Menular Strategis (PHMS) dan <i>Zoonosis</i> .	Kesadaran masyarakat akan produk peternakan yang ASUH.
Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.	Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	Rendahnya produktivitas ternak dan kualitas produk peternakan.	Adanya sistem kerjasama CSR dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan produktivitas ternak.
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan		

yang sesuai kebutuhan.	yang diselesaikan.		
Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan teknologi yang diterapkan oleh pertanian.		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional.	Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan.		
	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan.		
	Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani.		
	Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)		

	dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK).		
	Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.		

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 adalah “ Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar MISI 1 Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah”.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan.

Tabel. 15
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur

Sasaran Renstra DKP Prov. Jawa Timur	Indikator Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya daya saing sektor kelautan dan perikanan.	Meningkatnya daya saing sektor kelautan dan perikanan.	Ketersediaan sarana dan prasarana terutama benih ikan yang berkualitas kurang.	Tingginya permintaan ikan koi Blitar sebagai sentra Ikan Koi Nasional dan penghasil Ikan Gurame No. 2 di Jawa Timur.
Meningkatnya		Minimnya	Tersediaanya fasilitas

akuntabilitas kinerja perangkat daerah.		pengolahan produk peternakan yang dapat menambah nilai jual produk.	laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta unit pembenihan ikan.
		Ketergantungan cuaca pada produk perikanan tangkap yang sulit diprediksi.	Kesrjasama/ CSR dengan pihak terkait dan pihak swasta.

3.3.4. Telaah Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhububungan”.

Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Kontribusi sub kategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
2. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan.

Tabel 16

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Peternakan Provinsi Jatim	Indikator Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan produksi komoditas utama dan unggulan peternakan.	Persentase pertumbuhan (Daging, Telur dan Susu).	Produktivitas peternakan yang masih rendah.	Kerjasama/ CSR dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan produktivitas

			peternakan.
	Persentase nilai tambah produk olahan.	Minimnya pengolahan produk yang dapat menambah nilai jual.	Pendampingan menuju peternak milenial.
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan.	Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan.		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi, Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

- a. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
- b. Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah:
 - 1) mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah;
 - 2) mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

- 3) penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah.

Sedangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **Kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah seperti yang dimaksud diatas ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Blitar yaitu:

- a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
- b. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
- c. pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;
- d. pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;
- e. pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
- f. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
- g. pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana;
- i. pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
- j. pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;

- k. peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- l. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Blitar, yang meliputi Luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.588,79 Km² yang habis terbagi menjadi 22 kecamatan, 248 desa/kelurahan, tepatnya 28 kelurahan dan 220 desa daratan. Garis pantai sepanjang 45 km, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;

Dari sisi penataan ruang dan KLHS, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar, perlu diperhatikan dinamika internal dan eksternal spatial daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor kelautan dan perikanan. Salah satu strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar dalam pengembangan sektor kelautan dan Perikanan adalah:

- 1. Strategi pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan dengan mengembangkan kawasan penghasil perikanan di Blitar Selatan untuk perikanan tangkap;
- 2. Strategi pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;
- 3. Strategi pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;

4. Strategi untuk pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi unggulan yaitu salah satunya dengan mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok yang dalam perjalanannya telah berkembang di Kecamatan Sanankulon dan Gandusari;
 - b. Mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas;
 - c. Mengembangkan budidaya perikanan tambak/ air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang;
 - d. Meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;
 - e. Memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum;
 - f. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan
 - g. Mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan nelayan.
5. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;
 - b. Menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; dan
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan.
6. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah dilakukan melalui strategi:
 - a. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok;
 - b. Mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo

dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata.

Pengembangan perikanan tangkap meliputi:

- a. Pengembangan peruntukan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Wonotirto, Panggungrejo, Bakung, Wates, Binangun, Kesamben, Selorejo, Selopuro, Talun, Sutojayan, Kanigoro, Kademangan, Sanankulon, Srengat, Gandusari, Wlingi, Doko, Garum, Ponggok dan Udanawu.
- b. Pengembangan pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Wonotirto;

Pengembangan perikanan budidaya air payau yaitu:

- a. Komoditas perikanan air payau, meliputi Kecamatan Panggungrejo, Wates dan Bakung.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar dibagi berdasarkan:

- a. komoditas ikan konsumsi; dan
- b. komoditas ikan hias.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar untuk budidaya komoditas ikan konsumsi dikembangkan di Kecamatan Sutojayan, Gandusari, Sanankulon, Wonodadi, Selopuro, Talun, Udanawu, Wlingi, Kanigoro dan Garum.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar untuk budidaya komoditas ikan hias dikembangkan di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Nglegok, Gandusari, Udanawu, Sanankulon, Garum, Wlingi, Talun, Selopuro, Kanigoro, Sutojayan, Kademangan dan Ponggok.

Pengolahan hasil kelautan dan perikanan dikembangkan di wilayah Kecamatan Talun, Tambakrejo, Wonotirto, Wonodadi, Garum, Wlingi dan Selopuro, sedangkan untuk pemasaran produk kelautan dan perikanan tersebar diseluruh wilayah Kabupten Blitar.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi:

- a. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran;

- d. Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
- f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. Pengembangan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi;
- h. Pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi budidaya ikan; dan
- i. Pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan wilayah peternakan termuat dalam kebijakan pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan pedesaan dengan strategi pengembangan wilayah meliputi:

1. Pembangunan kawasan peternakan berskala besar pada setiap kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Peningkatan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
3. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di Kabupaten Blitar.

Pengembangan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan industri, meliputi:

1. Mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sector perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kademangan;
2. Mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di Kabupaten Blitar;
3. Mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri;

4. Mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial;
5. Mengembangkan konsep *cluster* sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak);
6. Memperkuat *cluster* sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi;
7. Mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global;
8. Mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber lokal dengan dukungan dari pihak pemerintah;
9. Mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan;
10. Menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan;
11. Menggalakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan.

Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah peternakan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - Mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan;
 - Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi;
 - meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (*ecofarming*);
 - Mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan
 - Mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Tabel 17

Rekomendasi untuk Dinas Peternakan dan Perikanan dijabarkan sebagai berikut:

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
Tantangan Pengembangan Potensi Ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur	Terciptanya kedaulatan pangan	Peningkatan dan pemerataan daya dukung pangan di setiap kecamatan	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Ketahanan pangan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Blitar	Optimalisasi unit-unit usaha di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Pengembangan Prasarana Pertanian	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
					DPC.Persaudaraan Mitra Tani Nelayan			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2026. Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan.

Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Isu Strategis dari sudut pandang pelayanan OPD :

1. Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya;
3. Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat serta bahan pangan asal hewan yang ASUH;
4. Bahan pakan ternak masih import sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi;
5. Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging);
6. Keterbatasan bahan baku pakan ternak (jagung) dan ketergantungan impor (bungkil kedelai);
7. Tingginya permintaan ikan hias khusus nya ikan koi;
8. Kurangnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
9. Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi terutama terkait mutu dan keamanan pangan;
10. Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi.

Isu Strategis dari sudut pandang sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi :

1. Pentingnya pengembangan SDM peternakan dalam rangka menghadapi MEA;
2. Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik;

Isu Strategis dari sudut pandang implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan OPD:

1. Ketergantungan hasil perikanan tangkap terhadap faktor cuaca dan adanya anomali iklim;
2. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam periode Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tersebut maka disusun sasaran strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Blitar berupa Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan. Indikator tujuan ini berupa Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan dan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Dari indikator ini dapat diketahui kontribusi pembangunan baik sub sektor peternakan maupun sektor perikanan terhadap laju pertumbuhan PDRB di wilayah Kabupaten Blitar

Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Blitar terdiri dari 3 (tiga) yang meliputi:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Indeks Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Melalui indikator diatas dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sub sektor peternakan dan sektor perikanan.
2. Meningkatnya produksi hasil perikanan.
Indikator berupa peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dari indikator diatas dapat diketahui proses perkembangan pembangunan perikanan di wilayah Kabupaten Blitar. Indikator ini didukung dengan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan pengolahan dan pengawasan usaha perikanan serta pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Blitar.
3. Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan.
Produktifitas peternakan menggambarkan peningkatan populasi yang diimbangi dengan kualitas produksi ternak di wilayah

Kabupaten Blitar. Indikator ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana peternakan serta pemdampingan/ penyuluhan SDM peternak.

Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini memberikan gambaran kondisi status kesehatan Kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Hewan.

Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar yang di buktikan dengan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam periode 2022- 2026 yang merupakan prasyarat produk peternakan telah siap memasuki perdagangan global modern (siap ekspor).

Tabel 18

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan		1. Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	%	13.4	13.4	13.8	14.6	14.9	15.2	15.34	15.34
			2. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	4.96	4.99	5.5	5.9	6.3	6.9	7.26	7.26
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai	80 / A	80 / A	80 / A	80 / A	80 / A	80 / A	80 / A	80 / A
		2. Meningkatnya produksi hasil perikanan	1. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7
		3. Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	1. Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	%	0,42	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2. Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	80	80	80	80	80	80	80
			3 Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar (%)	%	98	98	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal SKPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar sebagai berikut:

Kekuatan (<i>Strenght</i>):	Kelemahan (<i>Weakness</i>):
1. Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar.	1. Keterbatasan aparatur dalam jumlah maupun kualifikasi.
2. Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan.	2. Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas.
3. Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten.	3. Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang.
4. Lingkungan Sumberdaya Ikan yang relatif belum tercemar.	4. Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu.
5. Adanya kredit program dari pemerintah.	5. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
6. Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar.	6. Fluktuasi harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan.
7. Meningkatnya penanganan kasus penyakit Menular Strategis (PHMS).	7. Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang berkualitas.
8. Dukungan anggaran	8. Kurangnya jumlah dan

Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten. 9. Dukungan lingkungan kerja yang kondusif. 10. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana. 11. Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	kualitas SDM. 9. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran.
Peluang (<i>Opportunity</i>):	Ancaman (<i>Threat</i>):
1. Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan. 2. Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat. 3. Tingginya potensi pasar nasional dan internasional. 4. Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar. 5. Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak. 6. Kesadaran masyarakat peternakan akan pencegahan penyakit ternak.	1. Pelanggaran Peraturan Kelautan dan Perikanan. 2. Maraknya <i>Illegal Fishing</i>. 3. Kualitas sarana dan prasarana budidaya dan tangkap yang kurang memadai. 4. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan. 5. Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan. 6. Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dengan produknya yang ASUH. 7. Adanya investor asing yang masuk ke Indonesia (MEA).

Berdasarkan identifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai berikut:

Tabel 19
Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Analisis SWOT Isu-Isu Strategis	Strength (S)	Weakness (W)
	Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar	Keterbatasan aparaturnya dalam jumlah maupun kualifikasi
	Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan	Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas
	Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten	Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang
	Lingkungan sumberdaya Ikan yang relatif belum tercemar	Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu
	Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Meningkatnya penanganan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS)	Fluktuasi Harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan
	Meningkatnya konsumsi ikan	Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang berkualitas
	Dukungan lingkungan kerja yang kondusif	Kurangnya jumlah dan kualitas SDM
	Adanya komintmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
	Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi

			perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
Opportunity (O)	Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya	1. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan dmnistrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur 2. Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
	Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat		
	Tingginya potensi pasar nasional dan internasional		
Threat (T)	Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar		
	Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak	Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak	Intensifikasi penanggulangan penyakit ternak
	Pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dalam penangkapan ikan	Mengembangkan upaya perikanan tangkap untuk mengoptimalkan produktivitas	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya
	Kualitas sarana dan prasarana budidaya dan tangkap yang kurang memadai		
	Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha perikanan		
	Penurunan kualitas lingkungan		

	kelautan dan perikanan		
	Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dan produksinya yang ASUH		Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal
	Adanya investor Asing yang masuk ke Indonesia (MEA)		

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan sebelas (11) Strategi (St.) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar antara lain:

1. Penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
2. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap;
3. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya;
4. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
7. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
10. Fasilitasi perizinan usaha pertanian/ peternakan;
11. Penyuluhan/ pendampingan usaha pertanian.

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah;

3. Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah;
4. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
9. Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota;
10. Optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
11. Penyelenggaraan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
12. Fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
13. Peningkatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
14. Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
15. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;
16. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
17. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
18. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
19. Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ Kota;
20. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota;
21. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;

22. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
23. Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota lain;
24. Optimalisasi pembangunan prasarana pertanian;
25. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
26. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota;
27. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota;
28. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota;
29. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
30. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
31. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota;
32. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
33. Pelaksanaan penyuluhan pertanian serta pendampingan usahanya.

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 20
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berdasarkan Akhlak Mulia (<i>Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur</i>)		
MISI Ke IV :	Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<i>Urusan : Kelautan dan Perikanan</i>		
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Peyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Meningkatnya	Peningkatan	Optimalisasi Pengeloaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau
--	--------------	-------------	---

	produksi hasil perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Waduk, Rawa Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota
			Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ kota
			Optimalisasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Peningkatan Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk , Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
		Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
			Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)

Urusan : Pertanian (Peternakan)		
Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Optimalisasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Pengecer
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
	Optimalisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Optimalisasi Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ kota
	Optimalisasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat

		Veteriner
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
	Fasilitasi Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penyuluhan/ Pendampingan usaha Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian serta pendampingan usahanya

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar penyusunan pohon kinerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terdiri 11 (sebelas) yang terdiri:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dari 11 (sebelas) program yang telah ditentukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menjabarkan kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan pada jangka waktu 5 (lima) tahun telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel . 2.1
KERTAS KERJA
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								2021		2022		2023		2024		2025		2,026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan					Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	13.8	13.4		13.8		14.6		14.9		15.2		15.34		15,34			
					Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	%	5.5	4.99		5.5		5.9		6.3		6.9		7.26		7,26			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah			Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai/ Predikat	A/80	A/80		A/80		A/80		A/80		A/80		A/80		A/80			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	%	94.67	87.14	10,464,926,947	100	10,515,864,342	100	10,848,205,863	100	12,199,121,783	100	12,230,630,316	100	12,303,668,286	100	58,097,490,590	Disnakkan	
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	298,129,315	100	292,664,342	100	306,000,000	100	256,600,000	100	238,616,400	100	262,478,040	100	1,356,358,782		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	7,058,923,586	100	7,287,200,000	100	7,607,405,863	100	8,654,926,449	100	8,802,153,916	100	8,854,121,020	100	41,292,807,249		

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	94	95	469,202,288	95	552,500,000	95	466,000,000	95	508,100,000	95	435,960,000	95	464,118,670	95	2,895,880,958		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	93	95	155,416,800	60	148,000,000	95	192,800,000	95	347,295,334	95	378,474,867	95	403,122,354	25	1,625,109,356	1,625,109,356	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	95	100	1,454,076,398	80	1,480,500,000	85	1,499,000,000	90	1,588,000,000	90	1,476,500,632	90	1,448,679,222	90	8,956,473,752	8,956,473,752	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	86	90	1,029,178,560	90	655,000,000	90	667,000,000	90	723,200,000	90	773,924,500	90	741,148,980	90	4,618,800,590	4,618,800,590	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	0	-	0	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	125,000,000	100	130,000,000	500	586,000,000	5	
	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,2	0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		0,7		0,7			
			3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2300	2300	346,523,250	2536	799,000,000	2.663	1,054,423,521	2,796	1,116,114,533	2,300	1,217,964,151	2,935	1,222,248,114	2,300	5,409,750,319	4,609,750,319	
			3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	Nelayan/ kelompok nelayan	40	20	97,609,500	30	162,500,000	30	359,273,521	30	375,200,873	30	392,720,960	25	405,495,800	145	1,792,800,655	992,800,655	
			3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	nelayan	266	235	206,505,500	302	565,000,000	255	616,500,000	265	654,398,660	280	725,971,691	290	712,953,664	1,366	3,481,329,515	341,329,515	

			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	Ton	1780.1	1907	19,030,250	1984	45,000,000	1987	49,500,000	2028	54,450,000	2070	64,000,000	2,113	65,000,000	2,113	296,980,250		
			3.25.03.2.04	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	unit kapal	39	30	23,378,000	30	26,500,000	30	29,150,000	32	32,065,000	34	35,271,500	35	38,798,650	35	185,163,150		
			3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	Ton	17,762	17,800	2,783,071,750	17,978	3,004,100,101	18,158	3,363,346,975	18,339	3,586,134,300	18,523	3,592,813,904	19,708	3,608,284,757	19,708	17,154,680,036		
					Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	Ekor	224.127.450	225.000.000		227.250.000		229.522.500		231.817,725		234.135,902		236.477.261		236.477.261			
			3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Perikanan Bid. Pembudidayaan Ikan	Izin usaha	5	3	15,000,000	0	16,500,000	0	18,150,000	0	19,965,000	0	21,961,500	0	24,157,650	8	115,734,150		
			3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah embudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	pembudi daya	100	98	547,000,000	80	1,966,320,000	100	2,162,952,000	120	2,265,699,827	140	2,140,335,984	160	2,039,841,045	489	9,143,067,961		
			3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jenis Pengelol aan	5	5	2,221,071,750	5	1,021,280,101	6	1,182,244,975	6	1,300,469,473	6	1,430,516,420	6	1,544,286,062	6	8,699,868,780		
			3.25.05	Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi PUD	%	3	0	0	3	20,000,000	5	50,000,000	5	60,000,000	5	70,000,000	5	100,000,000	5	300,000,000		
			3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau , Waduk , Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	Orang/ Kelompo k	0	NA	-	15	20,000,000	22	50,000,000	25	60,000,000	27	70,000,000	30	100,000,000	30	300,000,000		

			3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolahan produk perikanan	%	10	Na	0	10	70,000,000	20	160,000,000	22	170,000,000	24	180,000,000	26	96,830,000	26	676,830,000		
			3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	Dokumen Tanda Daftar	1	NA	-	1	10,000,000	1	35,000,000	1	32,500,000	1	28,750,000	1	29,000,000	5	106,500,000		
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit Usaha	20	NA	-	20	10,000,000	22	55,000,000	24	60,500,000	26	66,550,000	28	67,830,000	120	193,330,000		
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	Ton	25	20,046	0	25	50,000,000	28	70,000,000	24,560	77,000,000	27,016	84,700,000	29,718	93,170,000	81,346	288,476,000		
	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan			Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	%	0,42	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
					Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	80		80		80		80		80		80		80			
					Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	%	98	98		98,1		98,1		98,2		98,2		98,2		98,2			
			3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	%	0,1	0,1	1,186,501,725	0,3	3,955,500,000	0,3	4,250,000,000	0,3	4,350,000,000	0,3	4,500,000,000	0,3	4,786,039,800		21,841,539,800		
			3. 27. 02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang digunakan	Unit	4	NA	0	4	102,000,000	4	110,000,000	4	115,000,000	4	120,000,000	4	272,137,300	20	719,137,300		
			3. 27. 02.2.02	Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	Jenis Fasilitasi	2	2	866,979,925	2	3,306,500,000	2	3,290,500,000	2	3,299,750,000	2	3,348,725,000	2	3,400,000,000	2	16,645,475,000		

					Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi	Unit usaha	26	26		26		28		30		32		34		34	0		
			3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	%	60	100	297,250,000	60	300,000,000	65	454,513,624	65	486,645,949	65	535,310,544	65	588,841,599	100	2,365,311,717	2,365,311,717	
			3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	Dokumen	291	375	50,000,000	325	110,000,000	350	121,000,000	400	133,100,000	450	146,410,000	601	161,051,000	2,304	671,561,000	671,561,000	
			3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Pelayanan	4,290	3,650	2,102,124,680	4,150	975,000,000	4,200	1,072,500,000	4,300	1,179,750,000	4,400	1,050,037,426	4,500	915,339,970	19,850	5,192,627,396	5,192,627,396	
			3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	Unit usaha	205	227	180,000,000	350	221,787,966	215	290,500,000	370	319,550,000	380	351,505,000	390	386,655,500	390	1,569,998,466	1,569,998,466	
			3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	Lokasi	3800	3,500	251,759,560	3,800	350,000,000	3,900	385,000,000	4,000	423,500,000	4,100	465,850,000	4,200	512,435,000	20,000	2,136,785,000	2,136,785,000	
			3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	0		100	429,046,395	100	471,951,035	100	519,146,138	100	571,060,752	100	600,161,500	100	2,591,365,819	2,591,365,819	
			3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	Bencana	3	-	-	3	429,046,395	3	471,951,035	3	519,146,138	3	571,060,752	3	600,161,500	3	2,591,365,819	2,591,365,819	
			3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Jumlah Pangajuan perizinan	%	2	20	30,000,000	20	445,834,381	20	479,132,958	20	524,299,729	20	525,653,918	20	528,790,400	20	2,503,711,385	2,503,711,385	

			3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Izin Usaha	0	2	10,000,000	0	401,834,381	0	429,932,958	0	470,799,729	0	467,403,918	0	464,715,400	2	2,234,686,385	2,234,686,385	
			3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Izin Usaha	13	5	10,000,000	2	32,000,000	2	35,200,000	2	38,100,000	2	41,310,000	2	45,441,000	23	192,051,000	192,051,000	
			3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	Izin usaha obat hewan	0	1	10,000,000	1	12,000,000	1	14,000,000	1	15,400,000	1	16,940,000	1	18,634,000	5	76,974,000	76,974,000	
			3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan peternak terampil	%	8	9,2	559,700,000	8	1,422,615,490	8	1,532,615,490	8	1,572,615,500	8	1,622,615,000	8	1,702,515,000	40	7,852,976,480	7,852,976,480	
			3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	orang	226	180	559,700,000	100	1,422,615,490	100	1,532,615,490	100	1,572,615,500	100	1,622,615,000	100	1,702,515,000	420	7,852,976,480		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja SKPD baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Peternakan dengan RPJMD Kabupaten Blitar khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Peternakan. Adapun penjabaran indikator sasaran RPJMD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan dan sasaran merupakan target yang diemban oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sesuai dengan Misi IV RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dimana sektor perikanan dan sub sektor peternakan termasuk dalam sektor unggulan daerah. Indikator Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan berupa Kontribusi PDRB Sektor Perikanan (Urusan perikanan) dan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (Urusan Peternakan).

Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan berupa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya produksi hasil perikanan serta Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan.

Berikut indicator sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

- Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah (Sekretariat)
- Meningkatnya produksi hasil perikanan (Urusan perikanan)
- Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan (Urusan Peternakan)
- Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
- Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar.

Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang akan dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan , hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/ tujuan. IKD berisi Indikayot Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci OPD. Berikut linieritas IKD dan IKK yang diampu Dinas Peternakan dan Perikanan.

Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	IKK	Ket
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dan Sektor Peternakan	Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	
		Presentase Peningkatan produktivitas peternakan	Urusan Peternakan
		Presentase wilayah yang terkendai dari penyakit hewan menular strategis	

-

Tabel 22

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan:								
	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	13.8	13.4	13.8	14.6	14.9	15.2	15.34	15.34
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	5.5	4.99	5.5	5.9	6.3	6.9	7.26	7.26
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):								
	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80/ A	80/ A	80/ A	80/ A	80/ A	80/ A	80/ A	80/ A
	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7

	Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	0,42	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	80	80	80	80	80	80	80
	Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar (%)	98	98	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2
II	INDIKATOR PROGRAM:								
	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100	87.14	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2,300	2,300	2,536	2,663	2,769	2,935	2,935	2,935
	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	17,762	17,800	17,978	18,158	18,339	18,523	19,708	19,708
	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	224,127,450	224,127,450	227,250,000	229,522,500	231,817,725	234,135,902	236,477,261	236,477,261
	Prosentase Pengolahan produk perikanan	10	NA	10	20	22	24	26	26

	Prosentase Peningkatan Produksi PUD	3	NA	3	5	5	5	5	5
	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	72	70	72	72	72	75	78	78
	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	86,9	81	81	83	85	87	88	88
	Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi	26	26	26	28	30	32	34	34
	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	NA	100	100	100	100	100	100
	Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perizinan	NA	20	20	20	20	20	20	20
	Prosentase peningkatan peternak terampil	8	8	8	8	8	8	8	8
III	INDIKATOR KEGIATAN:								
	Persentase dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan								
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	94	95	95	95	95	95	95	95
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	93	95	60	95	95	95	95	25
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	95	100	80	85	90	90	90	90
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	86	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	0	-	100	110	121	100	100	500

	Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	40	20	30	30	30	30	25	145
	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	266	235	302	255	265	280	290	1,366
	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	1780.1	1907	1984	1987	2028	2070	2,113	2,113
	Jumlah Kapal Perikanan yang terdaftar	39	30	30	30	32	34	35	35
	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Perikanan Bid. Pembudidayaan Ikan	5	3	0	0	0	0	0	8
	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	100	98	80	100	120	140	160	489
	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	5	5	5	6	6	6	6	6
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	0	NA	15	22	25	27	30	30

	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	1	NA	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	20	NA	20	22	24	26	28	120
	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	25	20,046	25	28	24,560	27,016	29,718	81,346
Urusan Peternakan -									
	Jumlah Sarana Peternakan yang digunakan	NA	NA	NA	4	4	4	4	20
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	900	850	950	1,000	1,050	1,100	1,150	4,100
	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi	60	60	62	65	67	69	69	69
	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	15	10	15	17	19	20	22	93

	Jumlah Benih/ bibit ternak, Bahan Pakan Ternak yang disediakan	0	NA	0	10	12	18	22	62
	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	3	6	7	5	5	5	6	6
	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dikelola	0	NA	0	2	2	2	2	2
	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	60	100	60	65	65	65	65	65
	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	291	375	325	350	400	450	601	2,304
	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	4,290	3,650	4,150	4,200	4,300	4,400	4,500	19,850
	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	205	227	350	215	370	380	390	390

	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	3800	3,500	3,800	3,900	4,000	4,100	4,200	20,000
	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	3	-	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	0	2	0	0	0	0	0	2
	Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	13	5	2	2	2	2	2	23
	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	0	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	226	180	100	100	100	100	100	420

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021– 2026 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang perencanaan dan penelitian pengembangan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH